

**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH DALAM MEMPREDIKSI STATUS *FINANCIAL DISTRESS*  
PADA KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2017-2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**HIDAYANI PUTERI**

2020/20043136

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH  
DAERAH DALAM MEMPREDIKSI STATUS *FINANCIAL DISTRESS*

*(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat  
tahun 2017-2021)*

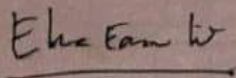
Nama : Hidayani Puteri  
Nim / TM : 20043136 / 2020  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Februari 2024

Disetujui Oleh:

Kepala Departemen Akuntansi

Pembimbing





Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 19710522 200003 2 001

Mayar Afriventi, SE., M.Sc.  
NIP. 19840113 200912 2 005




**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji oleh Tim Penguji Skripsi  
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Dalam Memprediksi Status *Financial Distress* (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021)  
**Nama** : Hidayani Puteri  
**NIM /TM** : 20043136 / 2020  
**Departemen** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Februari 2024

**Tim Penguji:**

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Mayar Afriyenti, SE., M.Sc.	1. 
2.	Anggota	Prof. Dr. Efrizal Syofyan, SE., M.Si., Ak, CA.	2. 
3.	Anggota	Fefri Imdra Arza, SE., M.Sc. Ak.	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayani Puteri  
Tahun Masuk/NIM : 2020/ 20043136  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 05 April 1997  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Komplek Vilaku Indah IV blok k-9 Padang Sumatera Barat  
Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pada Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2024  
Yang menyatakan,



Hidayani Puteri  
NIM.20043136/2020

## ABSTRAK

**Hidayani Puteri. 2023.** “Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Dalam Memprediksi Status *Financial Distress* (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021)”. Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

**Pembimbing : Mayar Afriyenti, SE., M.Sc.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio keuangan dan karakteristik pemerintah daerah dalam memprediksi status *financial distress*. Penelitian ini Studi Empiris Pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Data demografi penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. , dan data sekunder diolah dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan pengambilan sampel lengkap digunakan dalam strategi pengambilan sampel penelitian ini, yang mencakup sampel 19 kabupaten/kota selama periode 5 tahun. menggunakan analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa satu variabel, kompleksitas pemerintahan yang diukur dengan proksi populasi penduduk suatu wilayah, memiliki dampak yang cukup besar terhadap *financial distress*.

**Kata Kunci :** Keuangan Pemerintah Daerah; Karakteristik Pemerintah Daerah; Rasio Keuangan Pemerintah Daerah; *financial distress*.

## ABSTRAK

**Hidayani Puteri. 2023.** *"The Influence of Financial Ratios and Regional Governments Characteristics in Predicting Financial Distress Status (Empirical Study of Districts/Cities in West Sumatra Province in 2017-2021)". Thesis, Accounting Department. Faculty of Economy and Business. Universitas Negeri Padang.*

**Pembimbing : Mayar Afriyenti, SE., M.Sc.**

*This research aims to determine the influence of financial ratios and local government characteristics in predicting financial distress status. This research is an Empirical Study in districts and cities of West Sumatra Province from 2017 to 2021. The type of research used in this research is quantitative. The type of data used is secondary data. The demographic data for this research comes from the Central Statistics Agency of West Sumatra Province. , and secondary data is processed from regional government financial report (LKPD) from the West Sumatra Province Financial Audit Agency. A complete sampling approach was used in the sampling strategy of this research, which included a sample of 19 districts/cities over a 5 year period. used multiple regression analysis to analyze the data. The findings of this research show that one variable, the government complexity as measured by the proxy for the population of a region, has a fairly large impact on financial distress.*

**Keywords: Regional Government Finance; Characteristics of Regional Government; Regional Government Financial Ratios; financial distress.**

,

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pada Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat”** akhirnya dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa (Yonnafri), Mama (Jamilah), dan Kakak (Yaumil Fajri, Asih Ramabetri, dan Tesa Amelia) yang selalu memberikan do'a dan motivasi selama pembuatan skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Efrizal Syofyan, S.E., M.SI., Ak., CA selaku dosen penelaah dan dosen penguji untuk arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik lagi.
4. Bapak Fefri Indra Arza, S.E., M.Sc, Ak, selaku dosen penelaah dan dosen penguji.

5. Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Semoga bimbingan, arahan, dan bantuan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan yang sesuai dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi peneliti sendiri. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Padang, Februari 2024

Hidayani Puteri



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Masalah.....	11
D. Manfaat Masalah.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Kajian Teori.....	13
1. Teori Keagenan.....	13
2. Teori Signaling .....	14
3. Financial distress.....	17
4. Belanja Modal.....	18
5. Rasio Profitabilitas .....	21
6. Rasio Solvabilitas Anggaran .....	22
7. Kompleksitas Pemerintah Daerah.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Pengembangan Hipotesis.....	27
D. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Populasi dan Sampel .....	31
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Pengukuran Variabel .....	32
F. Teknik Analisis.....	36

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	41
B. Deskripsi Variabel Penelitian .....	43
C. Analisis Statistik Deskriptif.....	50
D. Uji Asumsi Klasik.....	51
E. Analisis Regresi.....	54
F. Uji Kelayakan Model.....	56
G. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Keterbatasan penelitian .....	63
C. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Belanja Modal Tahun 2017-2021 .....	4
Tabel 2.1 Kerangka Konseptual .....	30
Tabel 4.1 Prosedur Penentuan Data .....	43
Tabel 4.2 Financial Distress . .....	44
Tabel 4.3 Profitabilitas Rasio .....	45
Tabel 4.4 Rasio Solvabilitas Anggaran.....	47
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk . .....	49
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif .....	50
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.8 Uji Tolerance dan VIF .....	52
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas .....	53
Tabel 4.10 Uji Analisis Rgresi Berganda.....	54
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi.....	56
Tabel 4.12 Uji F (Simultan) . .....	57
Tabel 4.13 Uji Hipoteisis (Uji T).....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran pendapatan daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (Indonesia) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) yang disetujui oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan disuatu daerah untuk mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan efektifitas terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik serta kebutuhan masyarakat di suatu daerah (Syukri, 2019).

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan

tujuan dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah, maka suatu negara mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus untuk dapat berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengharuskan Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang bersumberkan dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, yang dipergunakan untuk keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pendapatan asli daerah berperan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana PAD menjadi sumber utama pendapatan suatu daerah, sebagai sumber dari pendapatan maka PAD harus digunakan sebaik mungkin dan dialokasikan sebanyak mungkin untuk alokasi belanja modal, hal ini memiliki tujuan agar pembangunan pada daerah berkembang dengan pesat dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi, Rizal (2017).

Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, keberhasilan program ini mulai banyak dipertanyakan. Otonomi daerah yang tadinya diharapkan mampu memperbaiki masalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, justru menimbulkan masalah baru akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan.

*Financial distress* yang mempengaruhi pemerintah dapat mengakibatkan penurunan pengeluaran untuk pemeliharaan infrastruktur dan penurunan investasi modal yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran lain (Bumgarner et al. (1991) Jones dan Walker (2007). Pemerintah harus mampu melakukan investasi infrastruktur dan investasi di perkotaan ketika berada dalam kesulitan keuangan karena dari perspektif kota mereka adalah investasi publik, yang tercermin dalam belanja modal (Jones & Walker, 2007).

Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia anggarannya banyak didominasi transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Ketergantungan yang sangat tinggi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdampak pada kondisi keuangan APBD dipengaruhi oleh kondisi

keuangan APBD. Salah satu daerah yang anggarannya banyak didominasi oleh dana transfer adalah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki Struktur investasi belanja modal masih di bawah 30% berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri). Hal ini sesuai dengan laporan pelaksanaan anggaran masing-masing LKPD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berikut data rasio belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Belanja Modal Tahun 2017-2021**

NO.	KAB/KOTA	TAHUN	RASIO BELANJA MODAL
1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2017	34.32%
		2018	28.07%
		2019	34.32%
		2020	20.12%
		2021	19.85%
2	Kabupaten Pesisir Selatan	2017	16.92%
		2018	19.38%
		2019	22.69%
		2020	19.22%
		2021	13.74%
3	Kabupaten Solok	2017	19.76%
		2018	16.25%
		2019	17.79%
		2020	11.24%
		2021	13.43%
4	Kabupaten Sijunjung	2017	24.23%
		2018	24.24%
		2019	23.17%
		2020	17.58%

		2021	16.78%
5	Kabupaten Tanah Datar	2017	18.80%
		2018	15.88%
		2019	17.67%
		2020	10.29%
		2021	11.80%
6	Kabupaten Padang Pariaman	2017	28.77%
		2018	21.17%
		2019	20.84%
		2020	15.59%
		2021	11.94%
7	Kabupaten Agam	2017	21.71%
		2018	17.15%
		2019	20.89%
		2020	11.29%
		2021	11.78%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	2017	21.03%
		2018	21.09%
		2019	21.01%
		2020	14.36%
		2021	13.36%
9	Kabupaten Pasaman	2017	20.52%
		2018	15.97%
		2019	13.97%
		2020	13.92%
		2021	11.80%
10	Kabupaten Solok Selatan	2017	31.35%
		2018	28.01%
		2019	27.29%
		2020	16.33%
		2021	17.39%
11	Kabupaten Dharmasraya	2017	32.38%
		2018	26.09%
		2019	24.70%
		2020	22.14%
		2021	20.65%
12	Kabupaten Pasaman Barat	2017	25.76%
		2018	29.75%



		2019	24.27%
		2020	18.15%
		2021	15.06%
13	Kota Padang	2017	19.15%
		2018	19.26%
		2019	20.88%
		2020	14.24%
		2021	13.47%
14	Kota Solok	2017	25.25%
		2018	24.63%
		2019	18.83%
		2020	6.45%
		2021	15.66%
15	Kota Sawahlunto	2017	23.69%
		2018	14.96%
		2019	17.11%
		2020	13.36%
		2021	14.29%
16	Kota Padang Panjang	2017	34.81%
		2018	20.40%
		2019	16.37%
		2020	10.05%
		2021	10.46%
17	Kota Bukittinggi	2017	19.61%
		2018	25.29%
		2019	26.24%
		2020	31.32%
		2021	14.31%
18	Kota Payakumbuh	2017	25.46%
		2018	20.89%
		2019	22.63%
		2020	17.09%
		2021	16.25%
19	Kota Pariaman	2017	23.90%
		2018	20.86%
		2019	22.23%
		2020	14.64%
		2021	11.37%

Sumber: Data diolah dari BPK Prov Sumbar

Persentase belanja modal yang disajikan selama 5 tahun terakhir diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat rata-rata berada dibawah di bawah investasi minimum yang telah ditentukan, sehingga mengindikasikan terjadinya *financial distress*. Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan yang terdapat dalam informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menguji rasio keuangan pada informasi laporan keuangan pemerintah daerah, yang terindikasi mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang *financial distress*, dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda. Waninda dan Arza (2019) yang menguji Relevansi Informasi Laporan Keuangan *Accrual Basis*: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status *Financial Distress*, hasilnya menunjukkan bahwa *Profitability Ratio* yang diukur menggunakan *Profit Margin Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun 2 variabel *Profitability Ratio* yakni *Return on Asset* dan *Return on Equity* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cohen (2018), yang menemukan bahwa *Return on Equity* kurang berpengaruh pada kinerja pemerintah di Kota Greek, Yunani dan tidak mengindikasikan *financial distress*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo *et al.* (2012) yang menguji Relevansi Informasi Laporan Keuangan *Cash Modified Basis*: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel *profitability ratio* mempunyai kemampuan untuk memprediksi status *financial distress*. Yevi *et al* (2020) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh *Budgetary Solvency Ratio* Terhadap *Financial Distress*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Zakia & Setiawan (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap *financial distress*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rury & Isfaatun (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah yang diprosikan dengan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil yang didapatkan, Sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai kondisi *financial distress* dengan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini secara khusus mengambil sampel pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan data time series dari tahun 2017-2021, penggunaan variabel yang peneliti ambil, dimana variabel-

variabel tersebut peneliti kombinasikan antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Rasio keuangan yakni Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas Anggaran dan karakteristik pemerintah daerah yaitu Kompleksitas Pemerintah Terhadap *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Peneliti menggunakan ruang lingkup penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat karena peneliti sebelumnya banyak meneliti pada ruang lingkup pemerintah Provinsi Se Indonesia dan yang menggunakan ruang lingkup Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih sedikit oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan ruang lingkup penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Alasan lainnya jika ruang lingkup penelitian terlalu besar maka akan sulit untuk melakukan penelitian dan hasil penelitian yang didapatkan menjadi tidak akurat karena terlalu banyak data serta fokus penelitian menjadi tidak terarah serta waktu penelitian tidak efektif dan efisien untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan data terbaru 5 tahun terakhir yakni sejak periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Serta penelitian ini menggabungkan variabel keuangan dan non keuangan karena saran dari peneliti sebelumnya yang hanya fokus ke salah satu variabel sehingga tidak bisa membandingkan bagaimana pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap *financial distress*.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menggabungkan variabel keuangan dan non keuangan untuk memprediksi *financial distress*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan dan karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap *Financial Distress*. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2017-2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejuahmana pengaruh Rasio Profitabilitas dalam memprediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021?
2. Sejuahmana pengaruh Rasio Solvabilitas Anggaran dalam memprediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021?
3. Sejuahmana pengaruh Kompleksitas Pemerintah daerah dalam memprediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Profitabilitas dalam memprediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Solvabilitas Anggaran dalam memprediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Pemerintah daerah dalam memprediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman terhadap penulis mengenai Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap prediksi *financial distress* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap prediksi *financial distress* di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

3. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

4. Peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut terutama untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.